

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

a. Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ende dari tahun 2018-2020 cukup efektif dengan rata-rata 89,75% hal ini berarti kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah cukup efektif dan pemerintah daerah mampu dalam memobilitaskan penerimaan PAD

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Ende dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi positif dan negatif rata-rata pertumbuhan pendapatan 2,67% hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunan apakah karena faktor makro yang diluar kendali atau buruknya manajemen keuangan Pemerintahan Kabupaten Ende

c. Rasio Kemandirian

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian Pemerintahan Kabupaten Ende dari tahun 2018-2020 menunjukkan angka rata-rata 8,1% dengan

kriteria rendah hal ini mendukung pendapat (Mahmudi,2019) bahwa semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah maka pemerintahan daerah belum membiayai sendiri kegiatan pemerintah. Rendahnya kemandirian keuangan Pemerintahan Kabupaten Ende menunjukkan bahwa belum optimalnya pemerintah dalam menyelenggara PAD dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

d. Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi PAD Kabupaten Ende tahun 2018-2020 menunjukkan rata-rata sebesar 5% dengan kriteria sangat efektif. hal ini menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ende sudah sangat efektif dalam memungut PAD artinya dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit pemerintah daerah dapat menghasilkan output yang optimal

e. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2018-2020 menunjukkan angka rata-rata 80,34% sangat tinggi, Hasil ini menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat sangat tinggi. Tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dikarenakan dikarenakan pemerintah daerah belum mampu menggali sumber keuangan di

daeranya sebagai sumber keuangan utama dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

f. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Ende tahun 2018-2020 menunjukkan angka rata-rata 6,36% dengan kriteria sangat rendah dapat dikatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Ende pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasinya nilai rasio ini dikarenakan masih rendahnya realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Ende. Rendahnya realisasi PAD ini menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah cenderung kecil dan tingkat ketergantungan Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi.

a. Rasio Kontribusi BUMD

Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa rata-rata derajat kontribusi BUMD Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2018-2020 untuk pendapatan daerah secara umum mencapai angka rata-rata 5,05% dengan kriteria sangat kurang Kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,53% dengan kriteria sangat kurang sedangkankan kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,17%. dari hasil ini memperlihatkan bahwa derajat kontribusi BUMD sangat kurang sehingga dapat dikatakan bahwa

tingkat kontribusi daerah dalam mendukung pendapatan daerah belum sepenuhnya terpenuhi.

2. Rasio Keuangan Belanja Daerah

a. Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan perhitungan Rasio efisiensi belanja Kabupaten Ende tahun 2018-2020 menunjukkan angka rata-rata 92,12% hal ini dianggap efisien karena Pemerintah Kabupaten ende dapat melakukan penghematan anggaran belanja dari tahun 2018-2020

b. Rasio Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Kabupaten Ende tahun 2018-2020 menunjukkan angka rata-rata 13,70% hal ini dianggap positif sehingga Pemerintah Kabupaten Ende dapat mengalihkan anggaran tertentu untuk belanja yang lain prioritasnya lebih penting, prinsipnya pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal daerah terjaga

c. Rasio Belanja Operasi

Berdasarkan perhitungan Rasio Belanja operasi Kabupaten Ende tahun 2018-2020 menunjukkan angka rata-rata 81,70% dengan kriteria baik. hal ini dianggap baik sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik

d. Rasio Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan Rasio Belanja modal Kabupaten Ende tahun 2018-2020 menunjukkan angka rata-rata 17,84% dengan kriteria tidak baik pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah yang umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi hal ini disebabkan pemerintahan daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat dari investasi modal jangka Panjang.

e. Rasio Belanja Tak Terduga

Berdasarkan perhitungan Rasio Belanja Tak Terduga Kabupaten Ende tahun 2018-2020 menunjukkan angka rata-rata 0,44%

3. Dilihat dari aspek anggaran SiLPA menunjukkan angka rata-rata Rp 96.394.602.528 sedangkan realisasi SiLPA menunjukkan angka rata-rata Rp 153.961.050. hal ini memiliki arah hubungan positif sehingga semakin besar tingkat pembiayaan SiLPA semakin besar belanja modal. dalam perencanaan SILPA sebagaimana diimplementasikan selama ini menilai kinerja anggaran berdasarkan habis tidaknya anggaran, jika unit kerja berhasil menghabiskan anggaran maka unit kerja tersebut akan dinilai berhasil, sebaliknya jika tidak dapat menyerap seluruh anggaran akan dinilai kurang berhasil

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya, agar menjadi semakin baik dengan cara lebih memaksimalkan serta lebih menggali potensi yang ada pada daerahnya, agar pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih banyak sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya maupun kebutuhan belanja daerahnya.
2. Pemerintah Daerah harus memperhatikan proporsi belanja modal agar memiliki dampak dalam pembangunan di daerah
3. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan ataupun mengalihkan SiLPA untuk kepentingan masyarakat yaitu lebih kepada pembangunan fasilitas-fasilitas umum di daerah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya